

**DAMPAK EFEKTIVITAS, AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA
DESA TERHADAP PEMBANGUNAN
DESA**

Cindi Pradita Sari

cindipraditasari246@gmail.com

Institut Teknologi dan Sains Mandala
Jember

Muhammad Firdaus

muhammadfirdaus2011@gmail.com

Institut Teknologi dan Sains Mandala
Jember

Nanda Widaninggar

nanda_widaninggar@unars.ac.id

Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

Abstract

This study aims to examine the effect of effectiveness, accountability, transparency and community participation in the management of village funds on development in Tanjungrejo Village, Wuluhan District. This study used a questionnaire distribution method with a purposive sampling technique. The analysis used is multiple linear regression. The population of this study was the Village Head, Village Officials, RT and RW, Community Institutions and the people of Tanjungrejo Village, Wuluhan District. The results of this study indicate that partially the effectiveness and accountability variables in the management of village funds have no effect on village development. The variables of transparency and community participation in the management of village funds partially affect village development. Simultaneously, the variables of effectiveness, accountability, transparency and community participation in the management of village funds have an effect on village development.

Keywords: *Effectiveness, Accountability, Transparency, Participation Community, Village Development*

I. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat yang berbadan hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (UU RI Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 Tentang Desa). Sumber pendapatan desa berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Penghasilan Asli Daerah (PAD), bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN. Dana

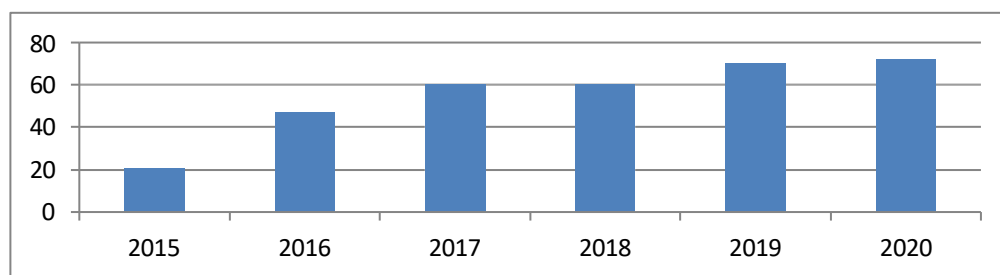
desa sendiri yaitu dana APBN ditentukan 10% dari dana di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap yang diperuntukkan untuk desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa untuk pembangunan dialokasikan sebesar 70% sedangkan sebesar 30% dialokasikan untuk operasional desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD minimal 10% dari Dana Alokasi Khusus (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). (ADD) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Peneliti menggunakan Dana Desa karena prioritas utama Dana Desa adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana

Desa juga digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk prioritas Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota jika penggunaan Dana Desa yang menjadi prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan sudah terpenuhi.

Gambar 1.1 Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2020 (dalam milyar rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa anggaran dana desa mulai tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan terus, dengan adanya kenaikan anggaran dana desa mulai tahun 2015-2020 diharapkan taraf hidup masyarakat desa juga meningkat, dapat mengentaskan kemiskinan dan dapat digunakan untuk memajukan desa supaya tidak menjadi desa yang tertinggal. Akan tetapi dengan semakin meningkatnya dana desa yang mengucur di desa setiap tahun, menjadi kekhawatiran bagi masyarakat akan terjadinya penyalahgunaan dana desa.

Banyak berita yang beredar tentang dana desa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dari sini pemerintah harus mengawasi secara ketat terhadap Efektivitas dan Akuntabilitas penggunaan dana desa terutama dalam bidang

pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tujuan dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta untuk mengatasi tingkat kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan dengan gotong royong untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Menurut Siregar (2020) fenomena yang sering terjadi di Desa adalah kurang meratanya pembangunan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana kesehatan dan olahraga, sarana transportasi dan terbatasnya lapangan pekerjaan.

Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa guna meningkatkan perbaikan pembangunan infrastruktur untuk

kebutuhan masyarakatnya. Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan sendiri dalam hal pembangunan infrastruktur masih belum maksimal, seperti jalan dan saluran irigasi, sampai saat ini, pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan masih kurang merata masih banyak jalan yang penuh dengan bebatuan terutama akses jalan daerah Krajan Kulon tepatnya jalan masuk dari jalan raya arah ke Desa Grobyok jalan tersebut sangat rusak di tambah lagi dengan saluran irigasi yang kurang memadai sekitar jalan tersebut yang menyebabkan saat hujan deras jalan tersebut tergenang oleh air hujan bahkan sampai banjir. Selain itu di daerah Dusun Karangsono jalan banyak yang rusak banyak jalan bebatuan yang tidak rata sehingga masyarakat susah untuk melewati jalan tersebut, padahal daerah tersebut petani membutuhkan akses jalan yang memadai untuk mengangkut hasil tani nya.

Dalam Upaya agar pemerintah desa memiliki tata kelola pemerintahan desa yang baik maka pemerintah desa harus menerapkan prinsip *good governance*. Menurut Robert Charlick dalam Pandji Santosa (2008:130) mendefinisikan *good governance* adalah pengelolaan urusan publik secara efektif melalui pembuatan kebijakan yang valid demi mempromosikan nilai-nilai masyarakat. Terdapat prinsip dasar sebagai syarat untuk terciptanya *good governance* menurut UNDP (*United Nation Development Program*) yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsif, keadilan,

partisipasi, penegakan hukum, konsensus, efisiensi dan efektivitas, dan visi strategik. Dari kesembilan prinsip dasar tersebut pada penelitian akan mengambil 4 prinsip yaitu: efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.

Dana desa harus dapat disalurkan ke dalam sektor-sektor yang paling dibutuhkan oleh masyarakat desa, sehingga penyaluran dana desa dan pembangunan desa dapat berjalan secara efektif. Menurut Mardiasmo (2002:134) efektivitas tidaklah menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh saja melebihi anggaran yang sudah ditetapkan karena efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian Rorong, dkk (2017) dan Kambey (2017) penggunaan dana desa terhadap pembangunan masih belum efektif dilihat dari indikator efektivitas yaitu ketepatan waktu, ketepatan biaya dan ketepatan berfikir belum efektif, dimana pada ketepatan waktu tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja dan ketepatan perhitungan biaya tidaklah sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan ditinjau dari kualitas bangunan, sedangkan ketepatan dalam pengukuran menunjukkan hasil yang efektif dilihat dari pengukuran jalan rabat beton dan kedalaman sumur air bersih yang dilakukan secara berulang ulang.

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa adalah

bagaimana pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kewajiban pemerintah desa kepada masyarakatnya dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa (Dewi, 2020). Pemerintah desa harus bisa menjadi pemegang amanah untuk mengelola sumber daya yang ada, melaporkan dan menyampaikan segala aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat (Mahmudi, 2016:23). Menurut Jaa (2019) dan Siregar (2020) membuktikan akuntabilitas secara keseluruhan pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa. Sedangkan penelitian Dewi (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa.

Pemerintah desa juga harus transparan dalam mengelola dana desanya terutama dalam bidang pembangunan supaya pelaksanaan pembangunan di desa efektif sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan penjelasan (Mahmudi, 2016:17) transparansi adalah keterbukaan untuk memberikan informasi yang nyata yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan hal ini juga menumbuhkan sikap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan dana desanya untuk masyarakat. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi memberikan informasi secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan yaitu bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Penelitian Jaa (2019), Siregar (2020), dan Dewi (2020) menunjukkan bahwa variabel transparansi secara keseluruhan pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh terhadap Pembangunan Desa.

Dalam sebuah desa jika masyarakatnya tidak percaya terhadap pemerintah desa, program yang sudah disepakati ketika musyawarah desa juga tidak akan berjalan dengan lancar karena dukungan bantuan dan partisipasi masyarakat sangat penting dan dibutuhkan, apabila partisipasi dari masyarakat kurang maka pembangunan juga tidak akan terlaksana karena minimnya sumber daya manusia dan juga pemerintah desa tidak tahu akan kebutuhan dan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Partisipasi masyarakat menurut Mubyarto (1984:35) dalam Ompusunggu (2017) adalah masyarakat mau berpartisipasi di setiap program yang direncanakan sesuai dengan kemampuan dan tanpa mengorbankan kesibukan masing-masing. Hasil penelitian Lombogia (2018) dan Mustanir (2016) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kategori baik

dan dapat meningkatkan keefektifan pembangunan desa. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap variabel efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pembangunan desa di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi sektor publik

Akuntansi sektor publik berkaitan erat dengan penerapan akuntansi di wilayah publik yang memiliki wilayah lebih luas dan satu kesatuan dibanding dengan sektor swasta. Akuntansi sektor publik dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan mendapatkan perhatian yang lebih terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik. Akuntansi sektor publik mendapat tuntutan yang besar dari masyarakat untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik menurut American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) adalah :

1. Memberikan dan mengelola informasi yang diperlukan secara tepat, efisien, dan ekonomis atas operasi dan alokasi sumber daya yang dipercaya kepada organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan kepada manajer untuk melaporkan

pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola informasi secara tepat dan efektif terhadap program dan penggunaan sumber daya yang menjadi tanggung jawabnya, dan juga memungkinkan kepada pegawai

Good Governance

Good governance menurut Robert Charlick pengelolaan kepentingan publik secara efektif melalui sebuah kebijakan yang valid demi mempromosikan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sedangkan menurut World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*” menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan masyarakat. UNDP (*United Nation Development Program*) mengemukakan karakteristik pelaksanaan *Good Governance* (Mardiasmo, 2002), yaitu :

1. **Transparansi**
Kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. **Akuntabilitas**
Bentuk pertanggungjawaban pemegang amanah kepada masyarakat atau publik atas kegiatan yang sudah dilaksanakan.
3. **Responsiveness**
Lembaga publik harus mampu memahami kebutuhan masyarakat dan tanggap dalam tanggap dalam melayaninya.

4. Keadilan
Masyarakat harus mempunyai kesempatan untuk memperoleh hak masyarakat untuk kesejahteraan nya.
5. Partisipasi
Dalam pembuatan keputusan atau kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung harus melibatkan masyarakat melalui perwakilan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Partisipasi dibentuk atas dasar kebebasan mengutarakan pendapat serta bebas berpartisipasi secara konstruktif.
6. *Rule of law* (Penegakan hukum)
Dalam karakteristik *good governance* harus ada perangkat hukum yang menindak lanjut pelanggaran yang melanggar peraturan hukum yang berlaku di pemerintahan tersebut.
7. Konsensus
Jika terdapat perbedaan kepentingan masyarakat maka cara penyelesaiannya harus mengutamakan musyawarah.
8. Efisiensi dan efektivitas
Dalam pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara valid atau berhasil (efektif) dan berdaya guna (efisien).
9. Visi strategis
Penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki visi di masa depan supaya pemerintahan jelas ke depannya harus bagaimana.

Konsep efektivitas

Mardiasmo

(2002:134)

efektivitas tidaklah menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh saja melebihi anggaran yang sudah ditetapkan karena efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi Efektivitas adalah keberhasilan terhadap target atau sesuatu yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan perencanaan. Makmur (2010:7) dalam Kambey (2017) mengukur efektivitas dengan 8 indikator yaitu :

1. Ketepatan penentu waktu
Menentukan waktu secara tepat akan mempengaruhi keberhasilan suatu program yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuannya.
2. Ketepatan perhitungan biaya
Dengan memperhitungkan biaya secara tepat maka program yang dijalankan tidak akan kekurangan biaya ketika program berlangsung hingga program selesai.
3. Ketepatan dalam pengukuran
Program atau kegiatan yang dijalankan pastinya memiliki ukuran keberhasilan, dimana ukuran tersebut merupakan bagian dari efektivitas program atau kegiatan.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan
Dalam menentukan pilihan harus benar-benar tepat, karena jika dalam pemilihan salah maka tujuan yang sudah direncanakan juga tidak tercapai dan hal tersebut akan mempengaruhi keefektifannya.

5. Ketepatan berfikir
Berpikir secara tepat dan matang dalam hal mengambil keputusan, berfikir dalam hal merencanakan program juga bisa mempengaruhi tingkat efektivitas suatu program.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah
Keberhasilan suatu program juga dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin dalam memberikan arahan, jika seorang pemimpin memberikan atau memerintahkan karyawannya secara jelas maka karyawan akan dengan mudah memahami dan program berjalan sesuai rencana, tetapi jika pemimpin memberikan arahan yang tidak jelas maka akan mengalami kegagalan karena karyawan tidak paham apa yang telah disampaikan oleh pemimpinnya.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan
Merencanakan tujuan harus tepat, karena aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan. Tujuan juga merupakan penunjang efektivitas jika tujuan yang tidak jelas dan tidak terarah maka organisasi tersebut tidak efektif.
8. Ketepatan sasaran
Menentukan program yang tepat sasaran akan menentukan keberhasilan suatu organisasi. Jika suatu program yang direncanakan tidak tepat sasaran maka akan menghambat jalannya tujuan yang sudah direncanakan.

Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menurut Mahmudi (2016:18) yaitu kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban seperti masyarakat. Dimensi akuntabilitas menurut (Hopwood dan Tomkins, 1984; Elwood, 1983) dalam Mahmudi (2011:19) antara lain:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran
Akuntabilitas hukum dan kejujuran yaitu lembaga-lembaga publik berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati peraturan hukum yang berlaku. Akuntabilitas kejujuran menekankan pada praktik organisasi yang sehat dan tidak terjadi malapraktik dan maladministrasi serta tidak melakukan pembohongan publik sedangkan akuntabilitas hukum menekankan pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang di syarat kan dalam menjalankan organisasi.
2. Akuntabilitas manajerial
Akuntabilitas manajerial adalah bentuk pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif.
3. Akuntabilitas program
Akuntabilitas program menekankan pada pembuatan

rencana program yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat bukan sekadar program untuk menghabiskan anggaran yang tidak jelas tujuannya dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

4. Akuntabilitas kebijakan
Akuntabilitas kebijakan menekankan pada pembuatan kebijakan yang harus mempertimbangkan tujuan kebijakan tersebut, mengapa tujuan kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, dan stakeholder mana yang akan memperoleh manfaat dan kerugian atas kebijakan tersebut.
5. Akuntabilitas finansial
Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan yang bertujuan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar atau publik. Akuntabilitas publik juga menekankan pada ukuran anggaran dan finansial, hal ini sangat penting karena pengelolaan keuangan publik menjadi perhatian utama yaitu masyarakat.

Konsep Transparansi

Adanya sebuah organisasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat diperlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah transparansi. Transparansi sangat penting sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi yang

bersangkutan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi memberikan informasi secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan yaitu bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam (Sugista 2017:9) menyebutkan 6 prinsip transparansi, yaitu :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, meliputi informasi mengenai anggaran untuk suatu program, pelaksanaan program yang direncanakan, dan bentuk bantuan atau program yang akan dilaksanakan.
2. Adanya publikasi melalui media baik online maupun offline mengenai proses kegiatan dan rincian anggaran yang dikeluarkan.
3. Adanya laporan mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum seperti masyarakat.
4. Adanya laporan tahunan tentang keuangan yang telah digunakan untuk kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan disertai dokumen-dokumen yang mendukung.
5. Adanya media publikasi organisasi yang berguna untuk menyebarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa.

6. Adanya pedoman dalam penyebaran informasi.

Dalam upaya menciptakan masyarakat informasi (information society) yang mempunyai hak dalam mengawasi jalannya pemerintahan, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Terdapat tiga aspek penting dalam transparansi publik, yaitu:

1. Adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan yang dilakukan.
2. Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan yang ditetapkan.
3. Berlakunya prinsip check and balance (antar lembaga eksekutif dan legislatif).

III. METODE PENELITIAN

Populasi

Objek penelitian yang digunakan peneliti adalah Warga dan Perangkat Desa Tanjungrejo, Jalan Manggar, Krajan Wetan, Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Menurut Jaya (2020:73) populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang berupa orang, institusi, serta benda-benda yang hendak diteliti. Berdasarkan penjelasan di atas populasi dari penelitian ini sebanyak 15.721 orang yang terdiri dari Kepala Desa, seluruh pemerintah desa dan masyarakat yang ada di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.

Sampel

Sampel adalah bagian yang diambil dari keseluruhan objek

yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Jaya 2020:73). Dasar pengambilan ukuran menggunakan metode Slovin dengan batas kesalahan toleransi sebesar 5%, sampel minimal yang bisa diambil adalah sebanyak 94 orang, sedangkan jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 orang yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, BPD, RT, RW, lembaga kemasyarakatan (PKK, LPMD, BUMDES, Karang Taruna), dan masyarakat Desa Tanjungrejo dengan minimal Pendidikan SMA. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Soewandji (2012:141) *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu dari peneliti.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada suatu fenomena atau gejala yang bersifat sebab dan akibat, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis datanya bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ada (Sugiyono, 2013:8).

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini, variabel terikat atau variabel dependen adalah Pembangunan

Desa (Y), sedangkan variabel bebas atau independen yaitu Efektivitas (X_1), Akuntabilitas (X_2), Transparansi (X_3), dan Partisipasi Masyarakat (X_4).

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data meliputi uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk menguji data yang menggunakan pertanyaan atau kuesioner untuk melihat jawaban responden tersebut layak atau belum pertanyaan-pertanyaan digunakan untuk mengambil data (Sujarweni 2015:160).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Alat uji yang digunakan yaitu uji determinasi untuk menjelaskan seberapa jauh kemampuan variabel dependen (X) terhadap variabel independen (Y). Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu (Ghozali, 2016:95), uji t untuk mengukur mengetahui berapa besar pengaruh antar variabel secara parsial, sedangkan nilai *Cronbach's Alpha*.

uji F untuk mengukur pengaruh antar variabel secara simultan alat uji yang digunakan adalah uji F

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Dasar pengambilan keputusan untuk uji validitas dengan membandingkan hasil r hitung dengan r tabel dimana $df=2$ dengan sig 5%. Berdasarkan hal tersebut diperoleh r tabel sebesar 0.197, maka jika $0.197 < r$ hitung maka poin-poin pernyataan kuesioner dinyatakan valid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa poin-poin pada setiap pernyataan telah memenuhi syarat validitas atau dinyatakan valid dilihat dari nilai *Pearson Correlation* atau r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0.197.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dapat dilakukan bersama-sama terhadap poin-poin pernyataan. Jika nilai $\text{Alpha} > 0,60$ maka pernyataan dikatakan reliabel dengan melihat

Tabel 1
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Standard Alpha	Keterangan
Efektivitas	0.841	0.600	Reliabel
Akuntabilitas	0.755	0.600	Reliabel
Transparansi	0.760	0.600	Reliabel
Partisipasi masyarakat	0.617	0.600	Reliabel
Pembangunan desa	0.667	0.600	Reliabel

Berdasarkan Tabel 1 dengan menggunakan *Cronbach Alpha's* >0.60, maka setiap variabel dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas menggunakan *Kolmogorov-Sminrnov* dengan kriteria Jika signifikan < 0,05, maka data dikatakan tidak normal dan jika signifikan > 0,05 maka data dikatakan normal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikansi >0.05 yaitu 0.282.

2. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji gejala Multikolinearitas ini dengan melihat *tolerance value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF) dimana apabila *tolerance value* > 0,1 dan VIF < 10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dan apabila *tolerance value* < 0,1

dan VIF > 10 maka terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen.

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai *tolerance value* dari keempat variabel memiliki nilai >0.1 dan nilai VIF <10 maka keempat variabel bebas tidak terjadi multikoloniearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji gejala heteroskedastisitas, dalam penelitian ini menggunakan grafik lot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Berdasarkan pengujian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen baik secara parsial maupun secara simultan.

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,862	2,557		4,640	,000
Efektivitas	,159	,167	,118	,956	,342
Akuntabilitas	,003	,162	,002	,016	,987
Transparansi	,412	,206	,251	1,998	,049
Partisipasi masyarakat	,518	,156	,323	3,332	,001

Hasil Penelitian

Berdasarkan output di atas dapat diperoleh hasil persamaan analisis regresi linier berganda yaitu:

$$Y = 11,862 + 0,159X_1 + 0,003X_2 + 0,412X_3 + 0,518X_4$$

Dengan konstanta sebesar 11,862, koefisien Efektivitas sebesar 0,159, koefisien Akuntabilitas sebesar 0,003, koefisien Transparansi 0,412, koefisien Partisipasi Masyarakat 0,518 dengan standar teror 0,05. Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan seperti dibawah ini :

1. Konstanta (a) memiliki nilai koefisien positif artinya Pembangunan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan sudah dilaksanakan dengan baik meskipun pembangunan desa belum dilakukan secara maksimal.
2. Variabel Efektivitas (X_1) terhadap Pembangunan Desa (Y) koefisien regresi nya sebesar 0,159 artinya hubungan antara Efektivitas dengan Pembangunan Desa searah dan positif, jika Efektivitas berjalan secara baik maka Pembangunan Desa juga berjalan sesuai dengan perencanaan awal.
3. Variabel Akuntabilitas (X_2) terhadap Pembangunan Desa (Y) koefisien regresi nya sebesar 0,003 artinya hubungan antara Akuntabilitas dengan Pembangunan Desa searah dan positif, jika

pengelolaan dana desa dilakukan secara Akuntabel maka Pembangunan Desa akan berjalan sesuai dengan perencanaan awal dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Variabel Transparansi (X_3) terhadap Pembangunan Desa (Y) koefisien regresi nya sebesar 0,412 artinya hubungan antara Transparansi dengan Pembangunan Desa searah dan positif, jika pemerintah desa transparan terhadap informasi yang berkaitan dengan dana desa dan masyarakat menerima informasi tersebut maka pembangunan desa juga akan berjalan dengan baik karena masyarakat memberikan informasi terkait dengan kebutuhan mereka.
5. Variabel Partisipasi Masyarakat (X_4) terhadap Pembangunan Desa (Y) koefisien regresi nya sebesar 0,518 artinya hubungan antara Partisipasi Masyarakat dengan Pembangunan Desa searah dan positif, jika masyarakat berpartisipasi menyuarakan aspirasi dan pendapatnya dalam kegiatan desa terutama pada saat Musrenbang maka pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan baik.

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan pengujian

diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,295 yang artinya variabel independen mampu menjelaskan sebesar 29,5% terhadap variasi/permodelan pada variabel dependen. Hasil koefisien determinasi terhitung rendah akan tetapi dapat digunakan sebagai bahan penelitian, karena koefisien determinasi hanya salah satu bukan satu-satunya kriteria memilih model yang baik.

Uji F (Simultan)

Berdasarkan perhitungan dapat dilihat F hitung sebesar 11,366 berarti nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 2,47. Berdasarkan kedua kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Efektivitas, Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat secara simultan atau keseluruhan berpengaruh terhadap Pembangunan Desa.

Uji t (Parsial)

Berdasarkan perhitungan dapat dilihat masing-masing t hitung pada variabel Efektivitas sebesar 0.956, Akuntabilitas sebesar 0.016, Transparansi sebesar 1.998 dan Partisipasi Masyarakat sebesar 3.332. Berdasarkan hal tersebut bisa diketahui bahwa untuk variabel X1 dan X2 secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y dilihat dari t hitung < t tabel, sedangkan untuk variabel X3 dan X4 secara parsial berpengaruh terhadap Y dilihat dari t hitung > t tabel. t hitung diperoleh dari $t = (a/2; n-k-1)$; $t = (0,015 ; 100-4-1)$; $t = (0,025 ; 95) = 1,998$. Selain itu bisa dilihat melalui nilai signifikan apabila $\text{sig} < 0,05$ maka

berpengaruh dan apabila $\text{sig} > 0,05$ maka tidak berpengaruh, berdasarkan tabel diatas nilai signifikan X1 dan X2 lebih dari 0,05 maka variabel secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y dan untuk X3 dan X4 lebih kecil dari 0,05 maka secara parsial variabel berpengaruh terhadap Y.

Interpretasi

Interpretasi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Efektivitas, Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengaruh Efektivitas, Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi

Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa menunjukkan bahwa pengaruh Efektivitas, Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat secara simultan mempunyai hubungan positif dan berpengaruh terhadap pembangunan desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaa (2019) dimana pelaksanaan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sehingga program serta rencana dalam upaya pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan desa dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebab terwujudnya suatu pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari partisipasi masyarakat.

Pengaruh Efektivitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa
Penguji pengaruh

Efektivitas dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa menunjukkan bahwa pengaruh Efektivitas mempunyai hubungan positif dan tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena penggunaan dana desa antara target dengan realisasi anggaran belum efektif masih mengalami fluktuatif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2020) tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan, dimana dana desa yang keluar tidak sama dengan dana desa yang sudah ditetapkan jadi masih ada pembangunan yang belum terselesaikan, dan dana desa yang belum mencapai target membuat pembangunan tidak sepenuhnya di bangun dan masyarakat masih merasa belum puas karena kebutuhannya belum bisa terpenuhi.

Pengaruh Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa.

Penguji pengaruh akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa menunjukkan bahwa pengaruh Akuntabilitas mempunyai hubungan positif dan tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa. Penelitian ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widaninggar, dkk (2020) dan Widaninggar, dkk (2019) yaitu Akuntabilitas masih belum menjadi variabel yang kuat dalam hal mempengaruhi keputusan penganggaran karena masih hanya sebatas pemenuhan perundang-undangan.

Pengaruh Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa.

Penguji Pengaruh Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa menunjukkan bahwa pengaruh Transparansi secara parsial mempunyai hubungan positif dan berpengaruh terhadap pembangunan desa. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana desa kepada masyarakat, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2020) dan Jaa (2019) dimana Transparansi secara parsial berpengaruh terhadap pembangunan desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa.

Penguji pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa menunjukkan bahwa pengaruh Partisipasi Masyarakat secara parsial mempunyai hubungan positif dan berpengaruh terhadap Pembangunan Desa. Pemerintah Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan berarti dapat menampung aspirasi dan menerima pendapat yang diberikan oleh

masyarakat saat kegiatan Musrenbang, dan juga masyarakat ikut terlibat dalam program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lombogia (2018) tentang pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan yang menunjukkan keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, kesediaan memberikan sumbangan dan tanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan.

V. SIMPULAN

Berdasarkan pengujian dari empat variabel yang terdiri dari Efektivitas, Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat penulis menarik kesimpulan bahwa secara simultan keempat variabel mampu mendorong pengelolaan dana desa secara lebih baik untuk pembangunan desa. Sedangkan secara parsial dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak terdapat pengaruh antara variabel Efektivitas (X_1) dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa (Y).
2. Tidak terdapat pengaruh antara variabel Akuntabilitas (X_2) dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa (Y).
3. Terdapat pengaruh antara variabel Transparansi (X_3) dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa (Y).
4. Terdapat pengaruh antara

variabel Partisipasi Masyarakat (X_4) dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa (Y).

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka implikasi dari hasil penelitian ini adalah pemerintah desa seharusnya mematangkan apa yang sudah direncanakan sebelumnya agar pada saat pelaksanaan pembangunan semua berjalan secara efektif dan tidak ada pembangunan yang berhenti di tengah pelaksanaan sehingga Desa Tanjungrejo dapat meningkatkan keefektifan dan Akuntabilitas Dana Desa karena keduanya sangat penting untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan supaya Desa Tanjungrejo menjadi Desa yang memiliki tata kelola administrasi yang baik. Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan juga harus tetap mempertahankan keterbukaan terhadap masyarakat desa karena hal itu akan berdampak lebih baik terhadap kemajuan pembangunan. Seperti yang telah diketahui dari penelitian terdahulu, dimana dengan adanya ketiga prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat sangat membantu dalam hal pembangunan dan juga dapat menyatukan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dana desa yang dikeluarkan dan kemudian digunakan dengan baik sesuai dengan target atau perencanaan awal maka pembangunan akan berjalan dengan maksimal dan kebutuhan

masyarakat dapat terpenuhi dan juga desa akan maju dan berkembang dengan sempurna seperti apa yang diharapkan (Setiawan, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Sugista Rizky.2017. Pengaruh Transparansi Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Lampung Selatan. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Amin, S & Widaninggar, N. (2019). “*Influence of Village Funds of Capital Accumulation and Community Empowerment*”. *Economics Development Analysis Journal* . Vol 8 (2) : 163-173.
<https://doi.org/10.15294/edaj.v8i2.27508>
- Dewi, F. G. R & Sapari, S. (2020). “Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : JIRA*. Vol 9 (5): 1-20.
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2881>
- Firdaus, M. (2019). *Ekonomika Suatu Pendekatan Aplikatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jaya, I. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Quadrant.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Aditama.
- Juliana, E. (2017). “Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di Kabupaten Asahan”. 21. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/2266>
- Kambey, E. (2017). “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegasan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara”. *Jurnal Eksekutif*. Vol 1 (1).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16756/>
- Lombogia, R, Ruru, J. M & Plangiten, N. (2018). “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Timbukar Kecamatan Sonder”. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 4 (50).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/19032/18593>
- Luthfia, A. R. (2013). “Menilik Urgensi Desa Di Era Otonom Daerah”. *Jurnal of rural and development* . Vol IV (20):136-137.
<https://jurnal.uns.ac.id/rural-anddevelopment/article/view/19032/18593>

- [w/1858](#)
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press
- Aditama. Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mustanir, A. (2016). “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang”. *Jurnal Politik Profetik* , Vol 4 (2): 225-238. <http://103.55.216.56/index.php/jpp/article/download/2749/2593>
- Ompusunggu, V. (2017). “Peranan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa”. *Jurnal Agribisnis Sumatera Utara* . Vol 10 (1): 95-102. <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/agrica/article/download/1157/1196>
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Rorong, M. (2017). “Efektivitas Enggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bangkok Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015”. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektuf/article/view/File/16045/15550>
- Setiawan, B. (2020). “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”. *JUHANPERAK*. Vol 1 (1): 173-183. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/557>
- Siregar, M. (2020). “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa”. *Jurnal Ilmiah Kohesi* . Vol 4 (2): 59-73. <https://kohesi.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/view/128>
- Sugista, R. A. (2017). “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan”. 1-63.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Statistik Untuk Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28102>
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar*

- Metodologi Penelitian.*
Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Widaninggar, N. (2019).
“Antecedent and
Consequence of Capital
Expenditure Allocation
East African Scholars”.
*East African Scholars
Journal of Economics,
Business, And
Management*, Vol 2 (4):
209-223.
- Widaninggar, N, Sumarni, M,
Amin, S & Sari, N. K.
(2020). “Capital
Expenditure's Antecedents:
Proof of The Public Sector
In East Java”. *International
Journal of Economics,
Business, and Management
Research*, Vol 4 (3): 74-91.
<https://ijebmr.com/link/517>
- Yikwa, K. (2020). “Partisipasi
Masyarakat Dalam
Pengelolaan Alokasi Dana
Desa Dalam Menunjang
Pembangunan Pedesaan”.
*Jurnal Berkala Ilmiah
Efisisensi*. Vol 20 (2): 116-
129